

Analisis Kerja Sama Perbatasan Pemerintah Thailand Melawan *Human Trafficking* Tahun 2018-2023

Fazara Anggie Azarine¹, Renitha Dwi Hapsari²

Program Studi Hubungan Internasional,

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur¹²

21044010148@student.upnjatim.ac.id, renithadwi.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

In an era of increasing cross-border mobility, there is a significant impact on the security of a country and its people. The rise of transnational crimes such as human trafficking is a major threat to a country, as human trafficking involves forced recruitment, transportation, and exploitation, which are human rights violations. This research focuses on Thailand as a source, transit, and destination country for human trafficking, particularly with GMS countries such as Laos, Cambodia, and Myanmar. This study aims to assess the effectiveness of the Thai government's policies and the actions taken to combat human trafficking in terms of Henry Willis' theory of border security policy from 2018 to 2023. This study employs a qualitative descriptive methodology focusing on 2018–2023. The report demonstrates Thailand's growing dedication to technological use and legal reform. However, inadequate interagency collaboration, corruption, and a lack of human resources hinder field implementation.

Keywords: Human Trafficking, Border Security Policy, Thailand

ABSTRAK

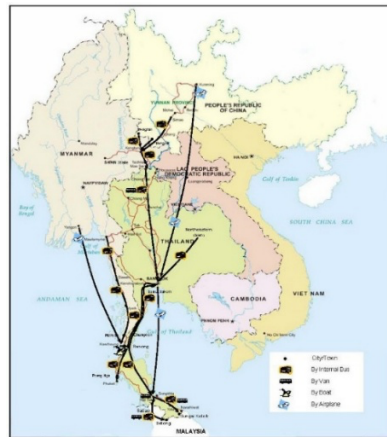
Di era mobilitas lintas batas yang semakin meningkat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keamanan sebuah negara dan masyarakatnya. Meningkatnya kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia menjadi ancaman utama sebuah negara, sebab perdagangan manusia melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi secara paksa, yang merupakan pelanggaran HAM. Fokus penelitian ini adalah Thailand sebagai negara sumber, transit, dan destinasi perdagangan manusia, khususnya dengan negara-negara di wilayah GMS seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana langkah-langkah Pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia ditinjau dari teori Henry Willis yakni *border security policy* sebagai landasan teori pada tahun 2018–2023, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Thailand. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada tahun 2018 hingga 2023. Penelitian menunjukkan peningkatan komitmen Thailand untuk reformasi hukum dan pemanfaatan teknologi. Namun, pelaksanaan lapangan menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, korupsi, dan koordinasi antar lembaga yang kurang baik.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Border Security Policy, Thailand

PENDAHULUAN

Akses transnasional saat ini menghidupkan pengaruh antarnegara secara keseluruhan, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa kemudahan akses antarnegara membuat sebuah negara menghadapi tantangan yang dapat mengancam keamanan

negaranya sendiri. Kemudahan akses yang semakin meningkat menyebabkan penyimpangan seperti kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukanlah masalah baru yang muncul. Sebaliknya, kejahatan transnasional berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di luar batas negara (Bruinsma, 2015). Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah salah satu kejahatan antarnegara yang semakin kompleks. Perdagangan manusia telah menimbulkan banyak masalah, terutama dalam hal keamanan manusia, karena perdagangan manusia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Thailand menghadapi realitas ini setiap tahunnya. Thailand dianggap sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, yang melibatkan negara-negara sekitarnya seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos (ECPAT, 2011). Berikut merupakan gambaran dari rute perdagangan manusia menuju Thailand dan negara-negara sekitarnya:



Gambar 1. Rute Perdagangan Manusia di Thailand dan sekitarnya

Sumber: (Wongboonsin, 2007)

Karena peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand, pemerintah mengambil tindakan baru karena Thailand diberi peringkat *Tier 2* dalam Laporan Perdagangan Orang (TIP). TIP adalah laporan tahunan yang memberikan peringkat untuk menunjukkan sejauh mana peran negara dalam perdagangan manusia. Negara-negara dalam *Tier 1* memiliki pemerintahan yang secara penuh memenuhi standar TVPA untuk pemberantasan perdagangan manusia; *Tier 2* memiliki pemerintahan yang secara signifikan berusaha untuk memenuhi standar, tetapi tidak sepenuhnya melakukannya; *Tier 3* adalah negara yang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan upaya pencegahan; dan *Tier 4* adalah negara yang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan upaya pencegahan. Pada 2013–2017, Thailand mengalami perubahan peringkat *Tier*. Pada 2013, Thailand berada di *Tier 2 watch list*, kemudian turun ke *Tier 3* pada 2014–2015, dan kembali ke *Tier 2* pada 2016–2017. Kemudian berlanjut pada 2018–2019, Pemerintah Thailand menduduki *Tier 2*. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan peran khusus dalam kasus perdagangan manusia.

Pemerintah Thailand melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara GMS untuk memberantas perdagangan manusia. Untuk melakukan ini, pemerintah membutuhkan kerja sama dengan negara-negara GMS dan organisasi internasional seperti UNODC, IOM, dan ASEANAPOL. Kerja sama tersebut terjalin karena tren perdagangan manusia di Thailand sangat besar dan berhubungan dengan tingkat global.

METODE PENELITIAN

Perdagangan manusia atau *human trafficking* dianggap sebagai kejahatan transnasional karena praktiknya melibatkan lebih dari satu negara dalam perekrutan, pengangkutan, dan pengeksploitasi korban. Perbatasan negara yang dianggap tidak aman sering dikaitkan dengan kejahatan transnasional. Untuk mengontrol dan melindungi perbatasan negara dari ancaman yang dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara, suatu negara menerapkan *Border Security Policy* (Willis, 2010). Ada tiga *core function Border Security Policy*: *Interdiction* (pelarangan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Networked Intelligence* (intelijen jaringan.)

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti langkah kebijakan Pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia. Seperti dalam penelitian Aungkana Kmonpetch tahun 2011 "The Phenomenon of Cross-Border Human Trafficking: Complexities of Exploitation Issues in Thailand" menganalisis kompleksitas perdagangan manusia di Thailand, dengan metode deskriptif kualitatif, dan melalui pendekatan migrasi dan perdagangan manusia.

Sementara itu penelitian milik Terence M. Garrett tahun 2018, dengan judul penelitian "*Where There's a Wall There's a Way: The End (?) of Democratic Discourse Regarding Immigration and Border Security Policy*" berfokus pada kebijakan keamanan perbatasan Presiden Donald Trump selama pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko pada tahun 2017. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, melalui pendekatan kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Penelitian ini memaparkan kebijakan Presiden Donald Trump dengan meninjau kebijakan pembangunan tembok keamanan antara Amerika Serikat dan Meksiko melalui lensa kebijakan imigrasi dan kebijakan publik.

Penelitian terdahulu ini sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan kebaruannya, penelitian ini akan melihat upaya Pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia dari 2018 hingga 2023 di Thailand dengan menggunakan teori perdagangan manusia dan *Border Security Policy*.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah atau fenomena serta karakteristiknya yang terkait tanpa memperhatikan mengapa atau bagaimana masalah atau fenomena tersebut dapat terjadi (Nassaji, 2015). Pendekatan penelitian deskriptif sendiri dapat dilakukan dengan

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang melalui tipe penelitian ini, penulis mencoba mengamati dan melihat upaya Pemerintah Thailand untuk memerangi human *trafficking* dari 2018 hingga 2023 dengan melihat dari sudut pandang *Border Security Policy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era globalisasi saat ini, perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional yang semakin meningkat. Di antara negara-negara Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia yang paling tinggi, Thailand menghadapi tantangan yang signifikan dalam menangani kompleksitas perdagangan manusia. Sejak 2018, Pemerintah Thailand telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani problematika perdagangan manusia. Salah satunya adalah kerja sama Pemerintah Thailand melalui kebijakan *Border Security Policy* yang memiliki tiga *core function: Interdiction, Deterrence, dan Networked Intelligence*. Kebijakan ini dijalankan untuk menanggulangi perdagangan manusia dan menjadi jembatan Thailand untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara di *Greater Sub-Mekong*.

Upaya Pencegahan *Human Trafficking* melalui *Interdiction*

Interdiction sebagai salah satu *core function* dari kebijakan *Border Security Policy* berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan pencegahan perdagangan manusia di Thailand dengan meningkatkan pengawasan di titik-titik perbatasan Thailand, baik melalui penambahan petugas keamanan perbatasan, peningkatan jumlah pos pemeriksaan, maupun penggunaan teknologi biometrik untuk mengidentifikasi migran. Laporan tahunan pemerintah Thailand tahun 2023 menyatakan bahwa jumlah pos pemeriksaan di wilayah perbatasan Thailand telah meningkat sebesar 35% sejak 2018. Ini dilakukan untuk mencegah sindikat kejahatan perdagangan manusia menggunakan jalur penyelundupan (The Royal Thai, 2023). Selain meningkatkan infrastruktur keamanan, Pemerintah Thailand juga menerapkan kebijakan *e-border pass* yang dikenal sebagai TDAC (*Thailand Digital Arrival Card*). TDAC adalah sistem izin masuk digital yang memungkinkan pekerja dan wisatawan masuk dan keluar Thailand secara legal dengan dokumen resmi.

Untuk meningkatkan pengawasan perbatasan, Pemerintah Thailand bekerja sama dengan kepolisian dan militer negara-negara di wilayah *GMS (Greater Sub-Mekong)*, terutama Myanmar, Kamboja, dan Laos. Jumlah kasus perdagangan manusia yang meningkat di Thailand pada tahun 2018 dengan 304 kasus, terutama melibatkan wilayah perbatasan dengan negara-negara *GMS*. Akibatnya, Pemerintah Thailand mulai bergerak maju, dan pada tahun 2019 mereka bekerja sama dengan Pemerintah Kamboja untuk memperkuat strategi kedua negara dalam menangani perdagangan manusia.

Untuk memerangi perdagangan manusia, Pemerintah Thailand secara bertahap bekerja sama dengan negara-negara anggota *Greater Mekong Subregion*

(GMS), seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar dari 2018 hingga 2023. Pejabat kepolisian senior, unit penyidik lintas negara, dan pejabat kementerian dari forum seperti *Mekong Operational Cooperation* dan *Lancang-Mekong Cooperation* turut hadir untuk operasi gabungan. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, Pemerintah Thailand dan Myanmar melakukan operasi kolaboratif dan berhasil menangkap 552 pelaku perdagangan manusia, yang sebagian besar adalah warga negara Myanmar (The Royal Thai, 2019). Sebaliknya, Pemerintah Thailand mengalami penurunan tajam dalam kasus perdagangan manusia pada tahun 2020, dengan 133 kasus yang dilaporkan melalui operasi gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara dalam hal keamanan perbatasan sangat penting untuk memerangi perdagangan manusia.

Wilayah atau distrik seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Tak, Sa Kaeo, bahkan Bangkok dikenal sebagai jalur masuk utama para korban dan pelaku perdagangan manusia, sehingga wilayah-wilayah ini menjadi pusat operasi. Data laporan tahunan Pemerintah Thailand pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia paling banyak terjadi di Bangkok pada tahun 2023, dengan 49 kasus, dan 12 kasus di Chiang Mai pada tahun 2022.



Gambar 2. Peta Statistik Perdagangan Manusia Tahun 2023 di Thailand

Sumber: (The Royal Thai, 2023)

Interdiction jauh lebih efektif ketika dilakukan di berbagai sektor dengan partisipasi masyarakat sipil. Faktor penghalang utama adalah luasnya perbatasan, kekurangan staf, dan banyaknya jalur ilegal yang juga dikenal sebagai jalur tikus yang sulit diawasi. Untuk tetap berfungsi secara optimal, dua *core function* utama lainnya adalah *Deterrence* dan *Networked Intelligence* yang dijalankan dan diimplementasikan secara bersamaan.

Upaya Pencegahan *Human Trafficking* melalui *Deterrence*

Deterrence core sangat krusial untuk kebijakan *Border Security Policy* di Thailand, terutama dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia.

Deterrence juga berfokus pada membuat pelaku tindak pidana jera dengan meningkatkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Strategi ini dilaksanakan oleh Thailand melalui kebijakan dan tindakan pencegahan yang didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan kolaborasi dengan aktor domestik dan internasional. Dengan demikian, penerapan *Deterrence* memerlukan kolaborasi dari berbagai *stakeholder* yang lebih luas, seperti organisasi internasional dan masyarakat sipil.



Gambar 3. Can You See Me Campaign di Thailand

Sumber: (A21, 2023)

Kampanye *Can You See Me*, yang dimulai pada tahun 2018, dianggap sebagai salah satu kampanye terbesar yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Kampanye ini menggunakan banyak media, seperti *Channel 3*, *Channel 7* dan NBT (National Broadcasting Television), stasiun radio lokal seperti Thai Radio Station (TRS), dan platform media sosial seperti YouTube dan Instagram resmi kampanye *Can You See Me* dalam akun @A21.

Pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi The App Company dan Edge Case Capital Partners untuk membuat aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia secara anonim melalui inisiatif Multi-Stakeholder for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries (MAST). MAST bertujuan untuk membantu pekerja migran, khususnya di sektor perikanan dan konstruksi, dalam melakukan proses pelaporan kasus dugaan perdagangan manusia (MAST Human, 2021).

Thailand telah memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku perdagangan manusia sebagai bagian dari strategi pencegahan. Hukuman bagi pelaku perdagangan manusia ditingkatkan menjadi maksimal 20 tahun penjara dan denda mulai dari 80.000 hingga 400.000 Bath sejak *Anti-Human Trafficking Act* disahkan pada tahun 2015 (Siam Legal, 2015). Selain itu, pemerintah melakukan reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa korban perdagangan manusia menerima perlindungan yang cukup dan memiliki akses yang mudah ke pengadilan.

Thailand juga telah membangun beberapa tempat untuk membantu para imigran yang menjadi korban perdagangan manusia. Surat Thani *Shelter* adalah penampungan terbesar, dan menawarkan layanan medis, konseling psikososial, dan

pelatihan keterampilan kepada korban yang ingin kembali ke masyarakat. Para korban di dalam selter tersebut menerima perlindungan penuh dari Pemerintah Thailand. Para korban dapat menghubungi pihak keluarga, kerabat, atau pemerintah negara asal mereka melalui Kedutaan Besar Thailand, yang ditujukan kepada Kedutaan Besar negara asal korban. Selain itu, para korban diberi kebebasan untuk bekerja di luar tempat penampungan, mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya, dan mereka diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah lokal seperti *Trirajvitthaya School* (The Royal Thai, 2019).



Gambar 4. Shelter Surat Thani di Thailand

Sumber: (The Royal Thai, 2019)

Pemerintah Thailand menggunakan penyuluhan dan sosialisasi sebagai metode pencegahan penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perdagangan manusia. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah edukasi berbasis komunitas. Di sini, pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti *Foundation for Women* dan *The Mirror Foundation* untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi para korban, mengadakan dialog komunitas, dan menyebarkan materi kampanye seperti pengetahuan tentang karakteristik perdagangan manusia atau tentang cara menghindari perdagangan manusia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Myanmar, Kamboja, dan Laos (The Mirror Foundation, 2025). Di Thailand, terutama di provinsi rawan seperti Chiang Rai, Tak, dan Songkhla, Kementerian Pendidikan telah memasukkan materi anti-perdagangan manusia ke dalam kurikulum sekolah menengah. Pelajar dididik tentang hak-hak pekerja, modus perekrutan ilegal, dan pentingnya berhati-hati saat menerima tawaran kerja mencurigakan.



Gambar 5. Forum Regional COMMIT di Thailand

Sumber: (Bangkok Post, 2022)

Thailand mengimplementasikan *deterrence* dan juga melalui kerja sama dengan GMS dan organisasi internasional. Thailand bekerja sama dengan negara-negara di wilayah Greater Mekong Subregion (GMS) melalui inisiatif Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) untuk membangun kebijakan bersama untuk menghentikan dan memerangi perdagangan manusia, yang mencakup sanksi yang lebih keras bagi mereka yang melakukan perdagangan lintas negara. Dengan bekerja sama, aparat perbatasan menjadi lebih kuat, jumlah penjaga perbatasan menjadi lebih rata, informasi tentang tren perdagangan manusia di forum bilateral, dan integritas hukum di seluruh negara-negara anggota meningkat.

Thailand juga menjadi anggota ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). ACTIP menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku perdagangan manusia dan membangun jaringan untuk menghentikan aktivitas sindikat kriminal. Kesuksesan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarpemerintah ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di seluruh dunia, bergantung pada upaya bersama antara negara-negara ASEAN dalam memerangi jaringan perdagangan manusia, baik melalui penegakan hukum maupun melalui penyuluhan dan pencegahan (ASEAN, 2022).

Upaya Pencegahan *Human Trafficking* melalui *Networked Intelligence*

Untuk mengatasi perdagangan manusia, Pemerintah Thailand menggunakan pendekatan kebijakan *Border Security Policy* dalam kurun 2018–2023. Karena ketiga fungsi inti dari kebijakan keamanan perbatasan saling berhubungan, *networked intelligence* adalah salah satu fungsi inti dalam upayanya untuk memberantas perdagangan manusia. Pemerintah Thailand telah bekerja sama dengan negara-negara di wilayah GMS dan dengan organisasi internasional seperti UNODC, IOM, dan ASEANAPOL untuk menjalankan fungsi *networked intelligence* seperti berbagi informasi tentang tenaga kerja dan perdagangan manusia, memperkuat sistem keamanan perbatasan, dan menggunakan *database* terkait perdagangan manusia, seperti kamera pengawas, sensor gerak, dan *drone* pemantau (The Royal Thai, 2023).

Tidak hanya lembaga penegak hukum, tetapi juga lembaga lain seperti otoritas imigrasi, kementerian ketenagakerjaan, organisasi masyarakat sipil seperti *The Mirror*, dan mitra regional melakukan hal ini. Menurut UNODC, *networked intelligence* adalah bagian penting dari kebijakan keamanan perbatasan karena merupakan komponen penting yang mendukung dua tugas utama kebijakan keamanan perbatasan lainnya, yaitu *interdiction* dan *deterrence* (UNODC, 2010). Tanpa intelijen yang kuat, terhubung, dan dapat dikomunikasikan secara langsung, upaya penegakan hukum dan pencegahan perdagangan manusia akan tidak terkoordinasi, sporadis, dan tidak reaktif.

Pada tahun 2018, TATIP atau Thailand Anti-Trafficking in Persons Taskforce secara resmi didirikan sebagai pusat data nasional untuk menangani perdagangan manusia. TATIP mengumpulkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, dan Sosial Thailand. TATIP berkembang menjadi organisasi khusus dari 2018 hingga 2023 dengan memungkinkan analisis tren tahunan modus operandi perdagangan manusia, pemantauan korban, dan pelacakan kasus berbasis lokasi (The Royal Thai, 2019). Selain itu, pada tahun 2019, Thailand meluncurkan sistem pelaporan berbasis komunitas tenaga kerja bernama Protect-U. Sistem ini memungkinkan pelaporan kasus perdagangan manusia melalui aplikasi Protect-U (The Royal Thai, 2020). Protect-U adalah platform pelaporan *online* yang memungkinkan pengguna mengirimkan informasi terkait dugaan kasus perdagangan manusia ke otoritas terkait dalam berbagai bahasa seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.



Gambar 6. Aplikasi Protect-U di Thailand

Sumber: (The Royal Thai, 2019)

Sejak 2019, Thailand telah membentuk gugus tugas khusus seperti Task Force Special Anti-Human Trafficking, yang diawasi oleh Departemen Investigasi Khusus (DSI), dan Thailand Internet Crimes Against Children (TICAC). Fokus utama oleh Royal Thai Police, khususnya melalui unit khusus Thailand Internet Crimes Against Children (TICAC), adalah pencegahan dan penindakan eksploitasi seksual anak di internet. Unit ini dibuat sebagai bagian dari tanggapan nasional terhadap meningkatnya kejahatan seksual *online* terhadap anak, yang semakin meningkat sebagai akibat dari kemudahan teknologi digital. Pada tahun 2023, TICAC mencatat 1.074 kemungkinan pelanggaran dan memulai 540 kasus, termasuk 99 kasus perdagangan orang, 236 kasus eksploitasi seksual anak, 182 kasus kepemilikan pornografi anak, dan 23 kasus

lainnya (The Royal Thai, 2019). Selain itu, melalui kerja sama dengan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) di Amerika Serikat, Thailand memproses 8.626 laporan melalui sistem *Cyber Tipline*. Upaya tersebut adalah contoh nyata dari penerapan *networked intelligence* di Thailand. Di sana, pertukaran informasi, respons cepat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia yang sistematis dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, Thailand juga mengadopsi *National Referral Mechanism* (NRM) secara penuh. NRM melibatkan semua lembaga dalam alur penanganan yang sama untuk merujuk korban perdagangan manusia dari deteksi hingga rehabilitasi (UNODC, 2021). Dalam lima tahun terakhir, Thailand telah meningkatkan penggunaan teknologi biometrik di pos perbatasan penting seperti Mae Sot (di perbatasan dengan Myanmar) dan Aranyaprathet (di perbatasan dengan Kamboja). Sejak 2018, sistem ini digunakan untuk mencatat identitas dan aktivitas migran yang masuk dan keluar Thailand. *National Referral Mechanism* (NRM) bertujuan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mendampingi korban perdagangan manusia melalui kerja sama antar lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. NRM mencakup beberapa tahap penting, seperti identifikasi korban oleh petugas lapangan seperti polisi dan imigrasi, penyaringan awal dan evaluasi risiko oleh pekerja sosial, pemberian status resmi sebagai korban, dan penanganan lanjutan seperti perlindungan.



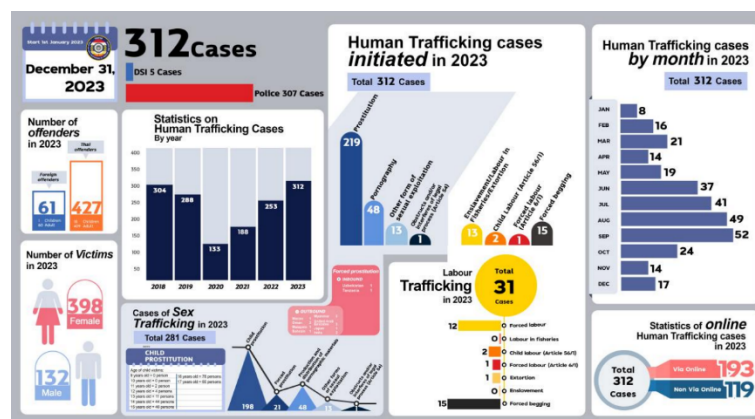
Gambar 7. Pelatihan Operasional NRM Thailand dan IOM

Sumber: (IOM, 2023)

Peningkatan jumlah pos pemeriksaan perbatasan dan pelatihan bagi petugas imigrasi dan kepolisian adalah bagian lain dari penerapan strategi ini. Lebih dari 10.000 petugas telah dilatih dalam identifikasi korban perdagangan manusia dan metode investigasi yang lebih canggih sejak 2018. Penerapan sistem visa dan izin kerja bagi pekerja migran adalah salah satu langkah paling penting dalam pelaksanaan kebijakan keamanan perbatasan. *E-border pass*, yang memungkinkan pekerja migran untuk masuk ke Thailand dengan izin resmi, merupakan bagian dari reformasi kebijakan imigrasi Thailand. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mengurangi jumlah migran ilegal yang sering menjadi korban eksploitasi tenaga kerja atau perdagangan manusia (IOM, 2025).

Analisis Upaya *Interdiction*, *Deterrence*, dan *Networked Intelligence*

Seiring perkembangan situasi global dan meningkatnya kompleksitas jaringan kejahatan transnasional, Thailand terus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan *Border Security Policy* dalam merespons ancaman perdagangan manusia. Perubahan modus operandi, seperti pemanfaatan media sosial, serta eksploitasi dalam bentuk kerja paksa daring, menuntut adanya respons kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi efektivitas ketiga pendekatan utama *interdiction*, *deterrence*, dan *networked intelligence* menjadi hal yang penting, khususnya dengan melihat capaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023.



Gambar 8. Diagram Statistik Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2023

Sumber: (The Royal Thai, 2023)

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus perdagangan manusia yang berhasil diidentifikasi oleh Pemerintah Thailand, yaitu sebanyak 312 kasus, naik dari 253 kasus pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat dipandang sebagai hasil dari semakin aktifnya pelaksanaan pendekatan *interdiction*, termasuk intensifikasi operasi oleh OCCHT dan keterlibatan lebih luas dari institusi keamanan seperti imigrasi dan angkatan bersenjata. Penyelidikan terhadap titik-titik rawan eksploitasi seperti kapal penangkap ikan dan tempat kerja paksa tersembunyi memperlihatkan peningkatan intensitas, yang berdampak pada bertambahnya jumlah tersangka yang ditangkap dan diselidiki. Meski demikian, peningkatan jumlah kasus juga dapat menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia masih berlangsung secara masif, dan bahwa operasi interdiksi selama ini belum sepenuhnya mampu membongkar akar jaringan pelaku di lapangan.

Dari sisi *deterrence*, perkembangan yang tercatat pada tahun 2023 menunjukkan adanya ketimpangan antara proses peradilan dan efek jera yang diharapkan. Sebanyak 542 tersangka berhasil diajukan ke pengadilan, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, hanya 211 pelaku yang dinyatakan bersalah, menurun dari 249 vonis pada tahun 2022. Sebagian besar pelaku memang menerima hukuman di atas dua tahun penjara, tetapi persentase vonis berat (di atas sepuluh tahun) masih belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa aspek pencegahan melalui penegakan

hukum belum berjalan secara optimal. Ketidakkonsistenan vonis, lemahnya pembuktian, serta keterbatasan sumber daya jaksa dan penyidik turut memperlemah daya gentar kebijakan ini.

Sementara itu, pendekatan *networked intelligence* terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pelaporan daring, pemanfaatan biometrik, dan integrasi data perbatasan. Thailand juga terlibat aktif dalam kerja sama regional melalui mekanisme COMMIT serta operasi penyelamatan lintas negara, termasuk misi pembebasan lebih dari 7.000 individu dari kamp penipuan di Myanmar. Namun, pencapaian ini belum mencerminkan keberhasilan yang merata. Masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan *National Referral Mechanism* (NRM), terutama di tingkat lokal, di mana petugas sering kali tidak memiliki pelatihan memadai untuk mengenali korban perdagangan manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi baru. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak teridentifikasi dan gagal mendapatkan perlindungan yang semestinya. Secara keseluruhan, ketiga pendekatan dalam *Border Security Policy* yang diterapkan Thailand menunjukkan adanya komitmen serius dalam pemberantasan perdagangan manusia. Namun, berbagai kelemahan struktural seperti praktik korupsi, koordinasi antar lembaga yang belum sinkron, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang menekankan pada akuntabilitas aparat, peningkatan efektivitas sistem rujukan korban, serta penguatan kapasitas digital dan forensik guna mendeteksi dan membongkar pola eksploitasi yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia selama tahun 2018–2023 melalui kebijakan keamanan perbatasan. *Interdiction*, *Deterrence*, dan *Networked Intelligence* menjadi tiga pilar utama yang menjadi fondasi strategis dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks. Dalam kurun 2018-2023, jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand menunjukkan angka yang berfluktuasi, dengan variasi jumlah pelaku dan korban per tahun. Tetapi data saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Thailand terus memperbaiki penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan kerja sama internasional. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang meningkat terhadap pemberantasan perdagangan manusia, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam implementasi kebijakan, terutama dalam hal konsistensi wawancara di lapangan, koordinasi data antar lembaga, dan penanganan akar penyebab seperti korupsi.

Pemerintah Thailand perlu mengatasi sejumlah tantangan yang masih ada agar kebijakan penanggulangan perdagangan manusia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Khususnya di wilayah perbatasan, pemerataan kapasitas dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Diperlukan adanya pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur teknologi di daerah perbatasan. Selain itu, mengingat pentingnya kerja sama regional dalam pertukaran data, regulasi yang

jelas dan sistem keamanan data yang kuat diperlukan untuk memperkuat perlindungan data korban. Pemerintah Thailand diharapkan dapat memperluas program penyuluhan berbasis komunitas terutama untuk kelompok berisiko yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan individu lokal dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran dan memperkuat mekanisme perlindungan di tingkat paling bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- A21. (2023, October 17). A21. Retrieved from A21: https://www.instagram.com/p/CyeKBULuYMM/?img_index=4&igsh=MWk5bTE1bmlvYTRqYg==
- ASEAN. (2022). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- Bangkok Post. (2022). *Thailand hosts COMMIT meeting against trafficking in six Mekong countries*. Retrieved from Bangkok post: <https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2465820/thailand-hosts-commit-meeting-against-trafficking-in-six-mekong-countries>.
- Bruinsma, G. (2015). *Histories of Transnational Crime*. London: Springer.
- ECPAT. (2011). *Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children Thailand*. Bangkok: ECPAT International.
- IOM. (2023). *Guidelines on the National Referral Mechanism*. Bangkok: International Organization for Migration.
- IOM. (2025). *IOM UN MIGRATION*. Retrieved from <https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process>
- MAST Human. (2021). *MAST Human*. Retrieved from MAST Human: <https://www.masthuman.org/mast/page/5>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 129-130.
- Siam Legal. (2015). *Thailand Law Library*. Retrieved from Thailand Law Library: <https://library.siam-legal.com/thai-law/anti-trafficking-persons-act-penalties-sections-52-57/>
- The Mirror Foundation. (2025). *The Mirror Foundation*. Retrieved from The Mirror Foundation: <https://themirrorfoundation.org/mirrorchiangrai/index.php/en/>
- The Royal Thai. (2019). *Royal Thai Government's Country Report on Anti Human Trafficking Efforts*. Bangkok.

The Royal Thai. (2020). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts*. The Royal Thai.

The Royal Thai. (2023). *Royal Thai Government's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts*. The Royal Thai.

UNODC. (2010). *Toolkit to Combat Smuggling of Migrants*. Vienna: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME.

UNODC. (2021). Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>

Willis, H. H. (2010). A Conceptual Model of Border Security as a Foundation for Measurement. *JSTOR*.

Wongboonsin, P. (2007). Trafficking for Sexual Exploitation into Southern Thailand. In P. Wongboonsin, *Trafficking for Sexual Exploitation into Southern Thailand*. Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est kontemporer.